



MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA DENGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022	PERATURAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 18 TAHUN 2023
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana; b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana; b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;</p> <p>15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.</p>
--	---

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. 3. Bupati adalah Bupati Bombana. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. 6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 7. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, diubah sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan diwadahi dalam bentuk Dinas</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe B.</p> <p>(2) Penentuan tipe Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan</p> <p>(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait 	<p style="text-align: right;">Pasal 7</p> <p>Tetap</p>

dengan bidang kesehatan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.	
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan perencanaan dan pengendalian kesehatan di daerah; b. melaksanakan bimbingan konsultasi dan koordinasi bidang kesehatan; dan c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di puskesmas 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepala dinas; b. sekretariat; c. bidang kesehatan masyarakat; d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; e. bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; f. sub bagian umum; g. sub bagian perencanaan dan keuangan; h. unit pelaksana teknis daerah; dan i. kelompok jabatan fungsional. <p>(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB IV TUGAS DAN FUNGSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Kesehatan.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sekretariat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga; c. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; d. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; f. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah; 	<p style="text-align: right;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>

<p>g. pemberian bimbingan dan arahan pada staf; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Sekretariat terdiri atas: a. sub bagian umum; dan b. sub bagian perencanaan dan keuangan; (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset daerah Lingkup Dinas Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat. (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat. (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bi dang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga, serta kesehatan jiwa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jiwa; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, Kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jiwa; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, Kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jiwa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang <i>survey lance</i> dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.</p> <p>(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang <i>survey lance</i> dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang <i>survey lance</i> dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang <i>survey lance</i> dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang <i>survey lance</i> dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.</p> <p>(2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Susunan organisasi Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan. (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 26</p> <p>Tetap</p>
--	---

[Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan/Muhammad Rizky Julyansyah]

Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.</p> <p>(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.</p> <p>(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.</p> <p>(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB V TATA KERJA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.</p> <p>(3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.</p> <p>(4) Sekretaris lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.</p> <p>(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.</p> <p>(6) Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IVa.</p> <p>(7) Pejabat Eselon III, IV, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(8) Formasi dan persyaratan jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tetap.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.</p>

<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Rumbia Pada tanggal 23 Februari 2022 BUPATI BOMBANA, ttd TAFDII</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Rumbia Pada tanggal 1 Agustus 2023 PJ. BUPATI BOMBANA ttd BURHANUDDIN</p>
<p>Diundangkan di Rumbia Pada tanggal 23 Februari 2022 Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana ttd MAN ARFA</p> <p>BERITA DAERAH KOTA BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 30</p>	<p>Diundangkan di Rumbia Pada tanggal 1 Agustus 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, ttd MAN ARFA</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 18</p>